

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Politik Luar Negeri dari sebuah negara memiliki beberapa tujuan yang salah satunya ialah untuk mencapai kepentingan nasional dari sebuah negara tersebut. Kebijakan yang diambil dari Politik Luar Negeri suatu negara mencerminkan suatu kondisi dalam negeri negara tersebut. Selain itu, kebijakan dari Politik Luar Negeri suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh beberapa perubahan dari tingkat regional maupun internasional. Hal ini juga tercermin dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat di dunia internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Windiani, 2010).

Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional yang mana bertujuan untuk melindungi wilayah, warga negara, pendapatan, maupun sekutu. Politik Luar Negeri Amerika Serikat cenderung dinamis karena mengikuti dengan kepentingan nasionalnya. Beberapa aktor dalam politik luar negeri Amerika Serikat seperti Presiden, Kongres, Departemen Luar Negeri, dan sebagainya sangat berpengaruh dalam keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

A. Sejarah Perkembangan

Politik Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya merupakan politik isolasionis namun kini berubah menuju politik aktifis. Hal ini diakibatkan oleh perubahan yang

terjadi di tingkat domestik maupun tingkat global. Politik isolasionis adalah politik yang terdiri dari pilihan para pengambil keputusan di Amerika Serikat pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Pilihan ini merupakan konsekuensi sebagai tindakan tidak ingin mencapuri urusan bangsa lain. Sikap isolasionis ini tumbuh karena beberapa faktor eksternal, salah satunya ialah perang antar bangsa di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19.

Selama tahun 1800 hingga 1945, Kongres serta Presiden bersikap sangat hati-hati dalam menjalan politik luar negeri. Dalam hal ini Kongres membatasi kebijakan Presiden agar tidak terlalu jauh terlibat dalam konflik di Eropa. Dasar-dasar politik luar negeri Amerika Serikat berkembang kuat melandasi munculnya Doktrin Monroe pada tahun 1823. Dalam doktrinnya Presiden Monroe menyatakan bahwa dengan mengisolir diri, Amerika Serikat akan terhindar dari bencana politik yang disebabkan oleh peperangan seperti yang terjadi di Eropa. Dengan doktrin tersebut maka Amerika Serikat menyatakan untuk tidak menjadi anggota blok manapun.

Pada peralihan antara abad 19 hingga 20, politik isolasionis sebagai pondasi dasar politik luar negeri Amerika Serikat perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, pada abad peralihan tersebut Amerika Serikat telah meninggalkan politik isolasionis tersebut karena terlibat

dalam perang merebut Puerto Rico, Guam Hawaii, Philipina dan Kepulauan Samoa dari Spanyol. Pada saat Amerika Serikat dipaksa terlibat dalam Perang Dunia I, keterlibatan Amerika Serikat dalam politik internasional semakin meningkat. Hal ini didorong oleh motivasi Amerika Serikat untuk menindas kejahatan perang.

Pada saat Perang Dunia II terjadi, Amerika Serikat mengalami dilema antara terlibat dalam perang atau tetap bertahan dengan politik isolasionis. Ketika Inggris merasa terdesak dan oleh agresi Hitler di Eropa, Inggris berusaha keras untuk mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat. Hingga akhirnya Amerika Serikat mengirimkan pasukan militer untuk membantu Inggris meskipun Presiden Roosevelt harus membujuk Kongres yang sangat mempertahankan politik isolasionisnya. Perubahan yang sesungguhnya terjadi ketika pesawat Jepang menghancurkan system pertahanan Amerika Serikat di Pearl Harbour. Ancaman yang disebabkan oleh invasi Jepang ini mengubah politik luar negeri Amerika Serikat dari isolasionis menjadi agresif (Cipto, 2003).

1. Perang Dunia I

Pada tahun 1914 ketika Perang Dunia I meletus, awal mulanya Amerika Serikat mengambil kebijakan netral, yaitu tidak terlibat dengan konflik dan tetap menciptakan perdamaian. Keterlibatan Amerika dimulai pada 1915

ketika sebuah kapal milik Jerman menenggelamkan kapal pesiar Britania RMS Lusitania yang menewaskan 128 warga negara Amerika Serikat. Amerika Serikat pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Woodrow Wilson memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak menoleransi perang kapal selam tanpa batas karena hal tersebut melanggar hukum internasional.

Pada tahun 1917, Jerman menyadari Amerika Serikat akan mengikuti perang dan tetap melanjutkan perang kapal selam. Setelah itu Jerman mengajak Meksiko untuk bergabung dalam melawan Amerika Serikat dengan imbalan membiayai perang Meksiko. Mengetahui hal tersebut, Presiden Wilson mengumumkan keputusan hubungan resmi di hadapan Kongres. Kemudian Amerika Serikat memberikan pengumuman perang setelah Jerman menenggelamkan tujuh kapal dagang Amerika Serikat.

Berdasarkan Doktrin Monroe, kebijakan luar negeri Amerika Serikat menolak segala intervensi pihak Eropa. Akan tetapi, Amerika Serikat akan menyatakan perang jika diserang terlebih dahulu. Doktrin Monroe tersebut berkaitan dengan kebijakan Presiden Wilson pada Perang Dunia I yaitu meningkatkan perdamaian dunia. Dalam kasus ini, bukan teritorial yang menjadi sasaran serangan melainkan penyerangan terhadap kapal-kapal dagang milik Amerika Serikat yang dianggap sebagai pelanggaran hak

asasi manusia. Masalah inilah yang menjadi alasan Amerika Serikat terlibat dalam perang.

Setelah sekutu memenangkan perang bersama sekutu, tidak membuatnya melakukan klaim atas wilayah-wilayah Amerika. Selain itu, beberapa upayanya dalam meyakinkan Amerika Serikat atas Liga Bangsa-Bangsa telah gagal. Hal ini menimbulkan dilema bagi perdamaian dunia karena usaha Presiden Wilson untuk mengakhiri perang dengan perang telah gagal. Kemenangan pihak sekutu membuat pihak tersebut berpotensi berkuasa sehingga perdamaian yang diharapkan Presiden Wilson tidak tercapai. Hal ini diduga karena keputusan yang diambil tidak sesuai dengan Doktrin Monroe yaitu politik menarik diri atau tidak terlibat dengan konflik bangsa lain. Namun keputusan perang yang diambil ini dianggap telah tepat demi menjaga kepentingan Amerika Serikat. (Subandi, 2017)

2. Perang Dunia II

Perang Dunia II terjadi beberapa tahun setelah Perang Dunia I sebagai kelanjutannya. Perang ini memiliki pengaruh yang besar terhadap berakhirnya konflik di Eropa bahkan berpengaruh terhadap hubungan internasional.

Perang Dunia II bermula dari serangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut milik Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii hingga menyebabkan Amerika Serikat

langsung menyatakan perang terhadap Jepang. Selain itu, Jepang juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Filipina. Selanjutnya Jepang menyerang koloni Inggris di Hongkong, Borneo, Malaysia dan wilayah-wilayah lain di Asia. Selain itu, Jepang juga menduduki wilayah jajahan Belanda salah satunya Indonesia. Kekuasaan Jepang di beberapa wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan upaya untuk memperkuat pasukan serta kekuatan dengan cara merekrut pasukan dari daerah kekuasaannya.

Pada tahun 1941 hingga 1944 Jepang berhasil menguasai wilayah Asia Tenggara dan Cina bagian Timur. Di waktu yang sama pasukan Amerika Serikat serta pasukan Eropa berhasil membangun pertahanan di Australia. Kemudian pada tahun 1942 pasukan gabungan Amerika Serikat dengan Sekutu berhasil melumpuhkan pasukan gabungan Jerman-Italia. Selanjutnya pada tahun 1944 pasukan Amerika Serikat dengan sekutu berhasil melumpuhkan Italia hingga menyerah terhadap Amerika Serikat dengan sekutu (Subandi, 2017).

3. Era Perang Dingin

Negara-negara sekutu di bawah kepemimpinan Amerika Serikat membuat Jerman terbagi menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat di bawah kepemimpinan

Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dan Jerman Timur yang berada di bawah kepemimpinan Uni Soviet. Hubungan Amerika Serikat dengan Uni Soviet memanas sesuai Perang Dunia II karena perbedaan ideologi serta kepentingan kedua negara tersebut terhadap negara-negara Eropa. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik dunia disebabkan oleh Uni Soviet yang agresif dalam menginvasi negara-negara di Eropa Timur.

Upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk menghadapi perluasan pengaruh ideologi komunis Uni Soviet di Eropa yaitu mengirim bantuan ekonomi dan militer ke Yunani dan Turki yang tengah mengalami krisis pada saat itu. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah kedua negara tersebut jatuh ke tangan Uni Soviet yang akan berdampak pada penguasaan Uni Soviet terhadap minyak di Timur Tengah. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak kepada negara-negara di Eropa karena negara-negara di Eropa tergantung pada suplai minyak dari Timur Tengah.

Selain membantu Yunani dan Turki, Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara di Eropa dengan tujuan untuk memulihkan negara-negara Eropa paska Perang Dunia II, tindakan bantuan ini disebut kebijakan *Marshall Plan*. Bantuan ekonomi tersebut memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan Uni Soviet sehingga pada tahun 1948 Uni Soviet menduduki

delapan negara-negara di Eropa. Dalam menanggapi invasi Uni Soviet, Amerika Serikat dan Eropa membentuk NATO. Organisasi ini bertujuan untuk melindungi *Marshall Plan* serta negara-negara Eropa Barat yang anti komunis dari serangan Uni Soviet.

4. Paska Perang Dingin

Datangnya era baru dimulai dari runtuhnya Uni Soviet yang ditandai dengan jebolnya tembok berlin, era baru ini disebut dengan Era Paska Perang Dingin. Setelah Perang Dingin berakhir, ancaman Uni Soviet hilang dengan sendirinya sehingga kekuasaan Presiden dalam politik luar negeri Amerika Serikat mengalami kemunduran, namun sebaliknya peran Kongres justru meningkat dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri.

Dalam era baru ini politik luar negeri Amerika Serikat mengalami beberapa perubahan. Selain itu, dalam era paska perang dingin juga ditandai dengan perubahan distribusi kekuatan. Amerika Serikat menjadi pusat kekuatan militer dunia, sedangkan Jepang, Jerman, Cina, beberapa negara Asia serta beberapa negara di Eropa menjadi pusat ekonomi dunia. Era paska perang dingin juga ditandai dengan organisasi-organisasi internasional yang memiliki peran penting sehingga negara tidak lagi menjadi satu-satunya actor (Cipto, 2003)

B. Aktor-Aktor Politik Luar Negeri Amerika Serikat

1. Presiden

Presiden merupakan salah satu aktor politik luar negeri Amerika Serikat. Peran Presiden pada masa politik isolasionis dibatasi oleh kekuasaan Kongres. Namun, kekuasaan Presiden dalam politik luar negeri lebih besar pada era Perang Dingin, yaitu era paska Perang Dunia II, hal ini dikarenakan konflik Amerika-Soviet. Selama era Perang Dingin, kekuasaan Presiden Amerika Serikat dalam politik luar negeri lebih dominan, hal ini dapat dilihat dengan meluasnya birokrasi politik.

Dalam hal ini Presiden juga menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan adanya wewenang tersebut, Presiden dapat menggunakan kekuatan militer serta mengumpulkan intelijen asing. Konstitusi menyatakan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi militer, serta kepala diplomat. Dengan ini maka dapat dikatakan Presiden bertanggungjawab terhadap pertahanan militer dan kepentingan nasional. (Septiandaru, 2018)

2. Kongres

Sebelum pecahnya Perang Dunia II, secara konstitusional Kongres paling berwenang dalam menyatakan perang serta memiliki otoritas dalam politik

luar negeri serta keamanan Amerika Serikat. Selain itu, Kongres memiliki peran strategis melalui komisi dan subkomisi. Peran Kongres mengalami pergeseran setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990.

Kongres memiliki wewenang untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri dengan melalui: (1) *Resolutions and Policy Statements*; (2) *Legislative Directives*; (3) *Legislative Pressure*; (4) *Legislative Restrictions*; (5) *Informal Advice*; (6) *Congressional Oversight*. Selain itu, Kongres juga berwenang untuk membuat Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan Batasan terhadap Presiden dalam menjalankan politik luar negeri (Cipto, 2003).

3. National Security Council

National Security Council didirikan setelah Perang Dunia II sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mensinkronkan antara kebijakan domestik dengan kebijakan internasional yang saling terkait seiring dengan meluasnya peran Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Dewan ini merupakan bagian dari Kantor Eksekutif Presiden. Dewan ini berfungsi untuk: (1) mengkaji tujuan, komitmen, dan resiko kebijakan luar negeri Amerika Serikat berdasarkan kekuatan nasional yang ada; (2) memberi saran dan nasihat kepada Presiden yang berkaitan

dengan kebijakan domestik, luar negeri dan militer dalam pandangan keamanan nasional.

4. Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri merupakan badan resmi pemerintah yang mengendalikan jaringan kantor-kantor perwakilan di luar negeri yang dipimpin dan dikelola oleh para diplomat yang tersebar di seluruh dunia. Para diplomat tersebut ialah wakil pribadi Presiden yang sekaligus mewakili pemerintahan Amerika Serikat dalam urusan seremonial di luar negeri. Departemen Luar Negeri berperan memimpin koordinasi dalam melaksanakan kebijakan luar negeri.

Dengan menggunakan jaringan kedutaan di seluruh dunia, Departemen Luar Negeri mengumpulkan serta menganalisis berbagai informasi yang dibutuhkan oleh Presiden. Informasi ini yang kemudian digunakan Presiden Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan politik luar negeri. Departemen Luar Negeri juga berperan sebagai penasihat Presiden terkait isu-isu kebijakan luar negeri. (Cipto, 2003)

5. Central Intelligence Agency

Central Intelligence Agency (CIA) merupakan salah satu aktor yang menentukan proses pembuatan kebijakan

luar negeri. CIA didirikan berdasarkan *National Security Act 1947* dengan tujuan utama yaitu mengumpulkan dan menganalisa serta menyampaikan analisa tersebut kepada Presiden dan Dewan Keamanan Nasional. Dalam menjalankan tugasnya, CIA menggunakan tenaga manusia dan peralatan seperti satelit mata-mata. CIA berwenang untuk melakukan kegiatan mata-mata di luar negeri serta mengumpulkan data dari negara asing kemudian melaporkan hasilnya kepada Presiden maupun Kongres.

CIA bertugas mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan keamanan nasional dalam hal mendukung perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kontribusi CIA dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ialah membuat laporan sebagai bahan acuan serta pertimbangan kebijakan (Septiandaru, 2018).

6. Departemen Pertahanan

Departemen Pertahanan merupakan gabungan dari Departemen Peperangan dengan Departemen Angkatan Laut. Pembentukan departemen ini bertujuan untuk menunjukkan supremasi sipil atas militer. Departemen Pertahanan memiliki peran pada era Perang Dingin berupa memberikan informasi serta nasihat strategis kepada Presiden dalam bidang keamanan maupun politik luar negeri. Peran Departemen Pertahanan akan semakin

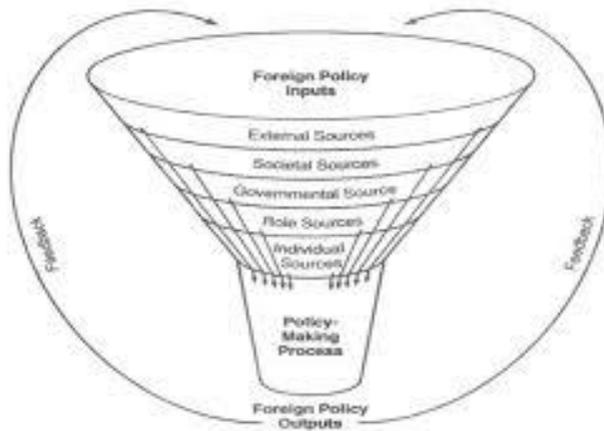
menonjol pada saat menggelar pasukan dalam sebuah operasi militer. Selain itu, Presiden dan Menteri Pertahanan berada pada garis komando untuk menggerakkan pasukan di lapangan (Cipto, 2003)

Departemen Pertahanan memiliki misi khusus yaitu menyediakan peralatan militer untuk mencegah perang serta melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Selain itu, Departemen Pertahanan juga turut memberikan kesempatan kepada tantara dan pelaut Amerika Serikat untuk mendapatkan pelatihan militer.

C. Proses Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, otoritas Presiden lebih besar dibandingkan Kongres. Dalam hal ini pengaruh Kongres lebih terbatas bahkan dikesampingkan dengan masukan dari kelompok kepentingan. Selain itu, konstitusi juga memiliki beberapa peran yang penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan Konstitusi telah mengatur tujuan utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu membangun sekaligus mempertahankan sebuah dunia demokratis serta keamanan untuk dunia internasional (Storey, 2007).

Proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat bersifat kompleks, hal ini dikarenakan proses pembuatannya melibatkan berbagai sumber yang saling terkait. Dalam buku yang berjudul *American Foreign Policy*, Eugene R. Wittkopf membagi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat menjadi *eksternal source*, *social source*, *governmental source*, *role source* dan *individual source* (Wittkopf, 2007).



Gambar 2 1 Pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sumber: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15465/11%20C%20LAMPIRAN.pdf?sequence=11&isAllowed=y>

1. External Source

External source atau bisa disebut dengan sumber eksternal, dapat diartikan sebagai pengaruh dari luar yaitu berupa aktor-aktor non-negara di dalam sistem

internasional yang memiliki pengaruh dalam proses kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sumber eksternal ini berupa INGO (*International non-Government Organization*), selain itu sumber eksternal juga berupa tindakan dari beberapa aktor internasional yang memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

2. Social Source

Eugene R. Wittkopf membagi Sumber Sosial (*Social Source*) menjadi dua variable yaitu opini publik dan politik dalam negeri yang dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan politik luar negeri merupakan bagian dari kepentingan nasional yang harus dicapai.

3. Government Source

Government Source atau dapat diartikan sebagai sumber dari pemerintah. *Government source* terdiri dari beberapa aspek struktur pemerintahan yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Beberapa contohnya ialah CIA dan Departemen Luar Negeri.

4. Role Source

Beberapa peran penting terdapat di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan tingkah laku sosial maupun norma-norma yang berlaku dalam peran itu sendiri memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Posisi peran penting dalam pembuatan keputusan dapat memberikan pengaruh kepada beberapa masukan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.

5. Individual Source

Individual source atau sumber individu yang dimaksud ialah seorang individu serta karakter individu itu sendiri. Karakteristik seorang pembuat kebijakan dapat memberikan pengaruh dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam hal ini karakteristik Presiden dapat memengaruhi keputusan-keputusan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

D. Pola Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terbagi ke dalam empat pola yang berbeda bahkan bertolak belakang. Hal ini disebabkan oleh setiap pola secara periode berada pada tahap interval waktu yang panjang.

1. Isolasionisme

Pola ini merupakan sikap tidak ingin mencapuri urusan bangsa lain dari para pengambil keputusan luar negeri Amerika Serikat. Faktor dari keberadaan kebijakan ini ialah adanya politik imperialisme terhadap negara lemah di Eropa (Septiandaru, 2018).

Bentuk kebijakan ini digunakan selama 200 tahun pertama perkembangan Amerika Serikat. Gagasan politik ini dikristalisasi dari *Thomas Paine's common sense* yang terdiri dari beberapa argument untuk menghindari aliansi. Gagasan ini diterima oleh Kongres yang ditandai dengan penolakan Amerika Serikat dalam melakukan aliansi dengan Perancis.

Di akhir masa jabatannya, George Washington menyatakan bahwa Amerika Serikat harus tetap mempertahankan tujuannya yaitu memperluas hubungan komersial dengan negara lain. Selain itu sebisa mungkin untuk tidak terlibat koneksi politik dengan negara-negara di Eropa yang tidak memuat kepentingan nasional Amerika Serikat. Selain itu, dikarenakan jarak yang cukup jauh antara Amerika Serikat dengan Eropa membuat hubungan Amerika Serikat dengan Eropa tidak efektif (Indirajati, 2017)

Politik isolasionis ini didukung oleh Presiden Monroe yang kemudian disebut dengan Doktrin Monroe. Dalam

doktrinnya, Presiden Monroe menyatakan bahwa hanya dengan mengisolir diri, Amerika Serikat akan terhindar dari bencana politik yang disebabkan oleh perang seperti yang terjadi di Eropa. Berdasarkan doktrin tersebut Amerika Serikat menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dengan blok manapun atau bisa disebut dengan *non-block*. Akan tetapi dengan adanya tekanan internasional yang meningkatkan mengakibatkan kebijakan isolasionis Amerika Serikat melemah pada pertengahan pada awal abad ke-20 (Lake, 1999).

2. Ekspansi

Pola ini bertolak belakang dengan pola isolasionis. Pola ini merupakan sebuah keinginan untuk menguasai suatu negara. Pola ekspansi ini merupakan perubahan dari pola isolasionis. Dimana sebelumnya politik luar negeri Amerika Serikat tidak ingin mencampuri urusan bangsa lain menjadi lebih agresif dengan ekspansi (Septiandaru, 2018).

Amerika Serikat harus mempertimbangkan kembali tentang kebijakan luar negerinya dalam menanggapi perang, hal ini dikarenakan keberhasilan militer Jerman di Eropa. Amerika Serikat mengalami dilemma besar, jika Jerman dan Italia membentuk hegemoni di Eropa dan Afrika serta Jepang menduduki Asia Timur maka belahan

bumi bagian barat akan menjadi sasaran berikutnya. Meskipun melakukan perlawanan, maka Amerika Serikat dapat mengalami kerugian yang besar.

Terjadinya perang di Eropa menjadikan Amerika Serikat ke dalam dua bagian, yaitu non-intervensi dan intervensi. Argumen intervensi muncul akibat kekhawatiran akan invasi yang dilakukan oleh Jerman. Sehingga pada 1940 Amerika Serikat terlibat dalam perang karena khawatir kekuatan fasisme Eropa akan berkuasa setelah perang.

Puncak perubahan politik luar negeri Amerika Serikat terjadi ketika Jepang menyerang pangkalan laut Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu Pearl Harbour, Hawaii pada 7 Desember 1941. Kemudian Amerika Serikat langsung mendeklarasikan perang dengan Jepang. Selanjutnya Amerika Serikat mendorong Jerman dan Italia untuk menyatakan perang. Hal inilah yang menyebabkan Amerika Serikat mengubah bentuk politik luar negerinya dari isolasionis menjadi agresif (Indirajati, 2017).

3. Intervensionalis

Pola ini bisa juga disebut sebagai campur tangan. Pola ini digunakan Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini setiap tindakan yang dilakukan oleh Amerika

Serikat ialah untuk mencapai tujuan kepentingan nasionalnya tersebut (Septiandaru, 2018).

Pada akhir 1940 hingga 1941 Amerika Serikat mengubah politik luar negerinya menjadi intervensionalis. Kebijakan ini dicetus oleh Presiden dengan mengizinkan Amerika Serikat untuk menjual senjata kepada negara yang sedang berperang, kebijakan ini dijuluki *cash and carry*. Kebijakan ini digunakan untuk sisi ekonomis dengan Inggris dan Perancis.

Kebijakan ini diterapkan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II untuk mencegah pengaruh komunis. Salah satu bentuk intervensinya ialah memberikan bantuan kepada Eropa untuk membangun kembali negaranya. Selain telah meninggalkan kebijakan isolasionis, Amerika Serikat kini aktif dalam tindakan intervensi dalam dunia internasional (Indirajati, 2017).

a. Intervensi Amerika Serikat terhadap Konflik Internal Libya

Pada tahun 1951 Raja Libya memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat. Hal ini ditandai dengan beberapa persetujuan yang dilakukan oleh Libya dengan Amerika Serikat. Namun pada akhir era 50-an Amerika Serikat melakukan eksplorasi minyak Libya hingga menyebabkan pemberontakan oleh golongan nasionalis. Memburuknya

hubungan Amerika dengan Libya ini terjadi hingga tahun 1980 yang ditandai dengan bentrokan militer antara Libya dengan Amerika Serikat.

Hubungan Libya dengan Amerika Serikat diperburuk dengan serangan yang dilakukan oleh Libya terhadap pangkalan laut Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat membalas dengan menghancurkan instalasi militer Libya di Kawasan pesisir. Kemudian pada tahun 1982 Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Libya pada tahun 1982 berupa embargo minyak, pembekuan aset milik Libya, serta larangan transaksi perdagangan (Septiandaru, 2018).

Sejak merdeka Libya telah mengalami tiga perubahan bentuk pemerintahan, yaitu Monarki, Republik, kemudian Sosial Republik. Dalam menjalankan politik luar negerinya melalui penyebaran demokrasi, Amerika Serikat meluncurkan program-program bantuan kepada negara-negara berkembang seperti bantuan keamanan. Penyebaran demokrasi yang dilakukan Amerika Serikat dilandaskan oleh kepentingan nasionalnya. Hal ini dapat diartikan bahwa Amerika Serikat memandang kepentingan nasional ditujukan dalam keamanan nasional.

b. Intervensi Amerika Serikat terhadap Konflik Etnis di Kosovo

Tindakan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap konflik etnis di Kosovo merupakan intervensi kemanusiaan yang memiliki tujuan untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini ditandai dengan upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam perdamaian serta menegakkan hak asai etnis yang tertindas (Indirajati, 2017)

Tindakan intervensi Amerika Serikat untuk menerima status otonomi Kosovo yang bertujuan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dimana dalam hal ini berupa diskriminasi yang dilakukan Serbia terhadap Kosovo. Dalam hal ini Amerika Serikat memiliki peran sebagai pendukung kemerdekaan Kosovo. Konflik Serbia-Kosovo itu sendiri muncul sejak tahun 1981 ketika Kosovo masih bergabung dalam republik Serbia.

Konflik etnis Kosovo merupakan konflik antara etnis Albania di Kosovo dengan etnis Serbia. Konflik ini terjadi dikarenakan etnis Serbia sebagai etnis mayoritas ingin memusnahkan etnis Albania sebagai etnis minoritas. Konflik ini pecah pada tahun 1989 yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran yang menunjukkan rasa kecewa etnis Kosovo terhadap pemerintahan Serbia. selain itu konflik ini juga pecah karena etnis Albania yang mayoritas

beragama Islam ingin memisahkan diri dengan etnis Serbia yang sebagian besar beragama Katolik (Indirajati, 2017).

E. Dinamika Hubungan Amerika Serikat dengan Rwanda

Amerika Serikat mulai menjalin hubungan diplomatik setelah kemerdekaannya pada tahun 1962 (State, 2018). Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afrika Timur dan Tengah mulai relatif konsisten sejak tahun 1990. Pemerintahan Clinton, Bush dan Obama bekerja dengan yang disebut generasi baru para pemimpin Afrika dalam menstabilkan benua serta menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang fokus terhadap pasar (Conversation, 2017)

Hubungan dekat antara Amerika Serikat dengan Rwanda yang terjalin sejak tahun 1990 didukung oleh bantuan pengembangan Amerika Serikat serta dukungan kuat untuk partisipasi Rwanda di penjaga perdamaian internasional. Kongres telah membantu keterlibatan Amerika Serikat melalui aprosiasi pihak asing. Bantuan dan inisiatif legislatif lainnya bersama dengan pengawasan anggota langsung ke pejabat Rwanda (Arieff, 2019). Amerika Serikat memberikan bantuan berupa bantuan asing untuk pendidikan, kesehatan, pemerintaha serta advokasi hak asasi manusia. Akan tetapi bantuan asing yang

diberikan tidak mencakup dalam krisis kemanusiaan ketika negara-negara Afrika jatuh ke dalam kekacauan perang, pembantaian, maupun genosida.

Selama dekade terakhir, administrasi dan Kongres melanjutkan dukungan kemitraan Amerika Serikat dengan Rwanda dalam pengembangan dan pemeliharaan perdamaian dengan cara mengkritik catatan hak asasi manusia dan peran pemerintah secara berkala dalam konflik regional. Khususnya Kongres, yang memberlakukan ketentuan dalam lesislasi bantuan alokasi yang membatasi bantuan militer Amerika Serikat ke Rwanda apabila ditemukan kelompok pemberontak di negara tetangga (Arieff, 2019)

Meskipun Rwanda adalah salah satu negara termiskin di dunia, akan tetapi Rwanda telah membuat kemajuan dalam mengembangkan lembaga pemerintahan nasional dan lokal, pembangunan ekonomi, menjaga keamanan, mencapai tujuan pembangunan millennium, mempromosikan rekonsiliasi, serta memperkuat system peradilan. Hal ini membuat Amerika Serikat berkomitmen untuk membantu Rwanda memenuhi kebutuhan penduduknya. Amerika Serikat mendukung upaya Rwanda untuk meningkatkan partisipasi demokratis, meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik, serta meningkatkan kualitas kesehatan (Rwanda, 2019).

Rwanda memenuhi syarat untuk manfaat perdagangan preferensial berdasarkan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika. Amerika Serikat dan Rwanda memiliki perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi serta perjanjian investasi bilateral. Amerika Serikat juga telah menandatangani perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi dengan Komunitas Afrika Timur serta Pasar Bersama untuk Afrika Timur dan Selatan. Rwanda sendiri merupakan anggota dari kedua organisasi regional tersebut. Rwanda dan Amerika Serikat termasuk dalam sejumlah organisasi internasional yang sama, termasuk PBB, IMF, *World Bank*, dan WTO (Embassy, 2009).